

## **BAB IV**

### **UPAYA INDONESIA MENJADI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PBB PADA PERIODE 2019-2020**

Diplomasi merupakan sarana atau bentuk usaha dari suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya, baik dilakukan dengan satu negara atau lebih, yaitu bilateral atau multilateral. Seperti yang telah dibahas pada bab I tentang konsep diplomasi itu sendiri. Pada Bab ini, penulis akan menjawab dari masalah yang diajukan pada rumusan masalah di Bab I. Pada Bab ini, penulis akan memaparkan usaha Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, dalam hal ini adalah diplomasi. Bab ini akan dibagi kedalam dua sub bab, yaitu diplomasi bilateral dan diplomasi multilateral. Pada sub bab diplomasi bilateral, penulis akan memaparkan berbagai aktifitas bilateral yang dilakukan perwakilan-perwakilan Indonesia untuk mengkampanyekan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pada sub bab diplomasi multilateral, penulis akan memaparkan berbagai aktifitas multilateral yang dilakukan perwakilan-perwakilan Indonesia untuk mengkampanyekan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

#### **A. Aktor Diplomasi**

Untuk menjalankan diplomasinya, negara Indonesia dibantu oleh beberapa perwakilan-perwakilan negara yang secara resmi ditugaskan untuk meminta dukungan kepada negara-negara anggota perserikatan bangsa-bangsa. Indonesia menggunakan aktor-aktor diplomasi jalur utama, dimana

dalam diplomasi jalur utama ini, diplomasi dilakukan oleh pemerintah.

Indonesia mengirimkan perwakilannya yaitu Menteri Luar Negeri Retno untuk meminta dukungan kepada Samoa, Kroasia, Namibia, Niger, Liechtenstein, Ekuador, Georgia, Monaco, Tunisia, dan Swiss pada September 2017 (Liputan6.com, 2017). Selain Menteri Luar Negeri Retno, Menteri Pertahanan Ryamizard juga membantu diplomasi Indonesia untuk meminta dukungan bagi Indonesia dalam pencalonan anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Menteri Pertahanan Ryamizard melakukan diplomasi kepada Swedia pada Mei 2017 (Eksa, 2017). Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga diminta oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk menyampaikan permintaan dukungan Indonesia untuk Jepang, agar Indonesia dapat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi kemudian menyampaikan pesan Menteri Luar Negeri tersebut kepada Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Nobuo Kishi pada April 2017 (Sulistyowati, 2017).

Duta Besar Republik Indonesia untuk Dakar, termasuk Sierra Leone, Mansyur Pangeran juga melakukan diplomasi untuk meminta dukungan bagi Indonesia kepada Presiden Sierra Leone Ernest Bai Koroma pada Juli 2017 (Tuwo, 2017). Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris Raya, Rizal Sukma meminta Inggris untuk memberikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia dalam keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa, yang mana Kerjaan Inggris Raya diwakili oleh Direktur Jenderal Politik di Luar Negeri dan Persemakmuran Kerajaan Inggris Raya Karen Elizabeth Pierce sebagai perwakilan Inggris (Gibbons, 2017).

## **B. Pola Diplomasi**

Berdasarkan polanya, diplomasi dibagi menjadi dua yaitu bilateral dan multilateral. Indonesia menggunakan kedua pola ini dalam diplomasinya.

### **1. Bilateral**

Diplomasi Bilateral dapat dilakukan melalui berbagai cara diantaranya penandatanganan perjanjian, tukar menukar Duta Besar, dan kunjungan kenegaraan. Dalam kasus ini, Indonesia menggunakan kunjungan negara sebagai diplomasi bilateralnya untuk mengkampanyekan negara sebagai calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.

Pada tahun 2016, Indonesia dan Ukraina melakukan pertemuan bilateral antar negara. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di dampingi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, melakukan pertemuan bilateral bersama Petro Poroshenko Presiden Ukraina di Istana Merdeka. Pertemuan bilateral antar negara pada tahun 2016 ini meningkatkan kerjasama baik di bidang pertanian, bebas visa, pelatihan diplomatik dan pertahanan (Lestari, 2016). Selain menandatangani perjanjian bilateral antar negara, Ukraina juga menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia dalam mengirimkan pesawat kebakaran dan mendukung Indonesia atas pencalonannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Ant, 2016).

Indonesia juga menjalankan diplomasi bilateral terhadap negara-negara Eropa lainnya, yaitu Republik

Ceko, yang merupakan salah satu negara di Eropa tengah. Pada tanggal 25 Februari 2017, rombongan Menteri Luar Negeri Republik Ceko melakukan kunjungan ke Indonesia. Kunjungan ini dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Republik Ceko, Lubomir Zaoralek. Dalam pertemuan bilateral kedua negara ini, Republik Indonesia dan Republik Ceko menindaklanjuti perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas serta kerjasama konsultasi bilateral secara berkelanjutan. Indonesia juga memanfaatkan kunjungan ini untuk meminta dukungan Republik Ceko dalam pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020. Lubomir Zaoralek sebagai Menlu Republik Ceko menjanjikan bahwa negaranya akan mendukung Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (Lembur, 2016).

Negara Eropa lainnya adalah Swedia, Swedia juga turut mendukung upaya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dukungan ini diberikan karena Swedia melihat Indonesia memberikan peran yang sangat penting bagi dunia khususnya peran di wilayah Asia Tenggara. Pernyataan ini disampaikan ketika Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryavudu melakukan kunjungan ke Swedia. Kunjungan ini merupakan salah satu kelanjutan dari kerjasama yang dibangun antara Indonesia dan Swedia. Selain memberikan dukungan bagi Indonesia sebagai calon anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, pertemuan bilateral antara Indonesia dan Swedia ini membahas keamanan maritim di Laut Baik, pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembahasan konflik di Laut Cina Selatan dan pembahasan mengenai penanganan terorisme (Eksa, 2017).

Pada tanggal 13-16 Mei 2017, DPR RI juga melakukan kunjungan persahabatan ke Georgia. Kunjungan ini dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon bersama anggota Komisi XI Heri Gunawan dan anggota Komisi VIII Sodik Muhadjid. Kunjungan perwakilan Indonesia ke Georgia ini juga membahas beberapa bidang, seperti halnya masalah politik, ekonomi hingga keamanan. Selain itu, Georgia juga menyatakan komitmennya untuk mendukung Indonesia sebagai negara tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Luar Negeri Georgia, David Zalkaliani, yang menyampaikan bahwasannya Georgia siap untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai DK PBB 2019-2020 (Sasongko, 2017).

Pada tanggal 30 Mei 2017, Indonesia juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Luxemburg. Luxemburg merupakan salah satu negara kecil di Eropa dan dikelilingi oleh negara Belgia, Perancis dan Jerman. Pada pertemuan bilateral tersebut, kedua negara membahas banyak hal, salah satunya adalah mengenai pencalonan keduanya untuk menjadi anggota DK PBB. Pembahasan tersebut menghasilkan kesepakatan keduanya untuk saling memberikan dukungan. Luxemburg akan memberikan dukungannya terhadap Indonesia dalam pemilihan anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Sedangkan, Indonesia memberikan imbalan dukungan kepada Luxemburg untuk menjadi anggota DK PBB periode 2031-2032 (Adelia, 2017).

Negara yang melintasi dua benua, Asia dan Eropa yakni Turki juga memberikan dukungannya untuk Indonesia menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap Perserikatan Bangsa Bangsa untuk periode 2019-2020. Hal ini disampaikan dalam diplomasi bilateral yang dilakukan

Indonesia di Turki pada tanggal 5 Juli, 2017. Selain menerima dukungan dari negara Turki, Presiden Indonesia, Joko Widodo dan Presiden Turki, Erdogan juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang merupakan kerjasama di berbagai bidang seperti industri pertahanan, perdagangan, investasi, energi dan penanggulangan terorisme (Dharma, 2017).

Sedangkan di wilayah Asia pada Jumat, 14 April 2017, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berkunjung ke Jepang. Dalam kunjungan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diminta oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi untuk menyampaikan permintaan dukungan dari Jepang untuk Indonesia yang ingin menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020. Kunjungan Susi Pudjiastuti ini disambut Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Nobuo Kishi. Jepang sebagai mitra kerjasama Indonesia baik dalam bidang investasi, pariwisata, perdagangan hingga kebudayaan juga menyampaikan dukungannya bagi Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (Sulistiyowati, 2017).

Selain itu, Ekuador sebagai salah satu negara di Amerika Selatan juga menyampaikan dukungannya kepada Indonesia dalam pencalonannya sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Dukungan ini disampaikan ketika Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syaifullah Tamliha melakukan kunjungan ke wilayah Amerika Selatan, meliputi wilayah Ekuador, Brazil dan Kolombia. Dukungan dari negara Ekuador ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ekuador, Guillaume Long di Quito (Prabekty, 2017).

Pada tanggal 12 Mei 2017, Presiden Republik Chili, Michelle Bachelet juga melakukan kunjungan ke Indonesia. Kunjungan ini disambut oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Merdeka. Tujuan kunjungan negara yang dilakukan oleh Presiden Republik Chili adalah untuk meningkatkan kerjasama antar Republik Indonesia dan Republik Chili. Indonesia dan Chili sejauh ini telah menjalin hubungan kerjasama bilateral yang baik, hubungan yang telah terjalin meliputi beberapa bidang, seperti bidang perdagangan, budaya dan politik. Dalam kunjungan ini juga, Presiden Republik Chili, Michelle Bachelet menyampaikan dukungannya bagi Indonesia yang ingin menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Hal ini tentunya sebagai bukti hubungan baik antara Indonesia dan Republik Chili, Chili juga mengakui bahwasanya Indonesia sebagai negara keempat yang memiliki penduduk paling banyak memiliki peningkatan kemajuan yang luar biasa (Swd-WK, 2017).

Pada hari Minggu tanggal 18 September 2017, Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla juga melakukan diplomasi bilateral ke negara Venezuela. Venezuela merupakan salah satu negara di kawasan Amerika Selatan. Pertemuan antara Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla bersama Presiden Venezuela Nicolas Maduro berlangsung di Pulau Margarita, Venezuela. Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta dukungan Venezuela untuk pencalonan Republik Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Nicolas Maduro menanggapi permintaan tersebut dengan positif dan memberikan dukungan bagi Indonesia (Agriesta, 2016).

Di wilayah Afrika Barat, Indonesia juga mendapatkan dukungan untuk pencalonannya sebagai

anggota tidak tetap DK PBB dari Republik Niger yang merupakan salah satu negara di wilayah Afrika Barat. Dukungan ini disampaikan ketika Republik Indonesia dan Republik Niger melakukan diplomasi bilateral ke Indonesia pada tanggal 12 September 2017. Presiden Niger Mahamadou Issoufou menyampaikan dukungannya kepada Indonesia dan mengakui Indonesia memiliki peran penting bagi keadaan dunia, khususnya yang terkait terorisme. Dalam agenda ini juga Presiden Joko Widodo dan Presiden Mahamadou Issoufou sepakatan menjalin kerjasama di bidang bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas, serta pembentukan sidang komisi bersama (Saputri, 2017).

Selain mendapatkan dukungan dari Republik Niger, Indonesia juga melakukan diplomasi bilateral terhadap negara Sierra Leone yang merupakan negara di wilayah Afrika Barat. Duta Besar Republik Indonesia, Mansyur Pangeran melakukan diplomasi bilateral terhadap negara Sierra Leone. Diplomasi bilateral antar negara ini membahas tentang rencana Sierra Leone membuka kantor perwakilannya di Jakarta dan rencana Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Presiden Sierra Leone, Ernest Bai Koroma pada pertemuan bilateral dua negara ini menyampaikan dukungannya terhadap Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, selain itu Presiden Ernest juga mengingkan prioritas kerjasama kedua negara di bidang pertanian, transportasi, kemaritiman, pertambangan dan pendidikan (Tuwo, 2017).

Salah satu negara anggota tetap yang dimintai dukungan oleh Indonesia adalah Inggris. Pada 5 Oktober 2017, Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, Inggris mengadakan resepsi diplomatik untuk

memperingati hari ulang tahun ke-72 Republik Indonesia sekaligus Tentara Nasional Indonesia secara sederhana. Dalam resepsi diplomatik tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris Raya Rizal Sukma memberikan sambutan dan secara khusus meminta Inggris memberikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia dalam keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa, yang mana Kerajaan Inggris Raya diwakili oleh Direktur Jenderal Politik Luar Negeri dan Persemakmuran Kerajaan Inggris Raya Karen Elizabeth Pierce sebagai perwakilan Inggris. Inggris tidak merespon langsung permintaan Indonesia tersebut akan tetapi kedua negara menekankan pentingnya jalinan persahabatan kedua negara yang selama ini terus meningkat (Gibbons, 2017).

Pertemuan-pertemuan bilateral yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia kepada negara-negara sahabat tentunya untuk menjalin kerjasama baik dibidang politik, ekonomi, pariwisata, keamanan dan lainnya. Akan tetapi Indonesia juga memanfaatkan pertemuan-pertemuan bilateral ini untuk melakukan kampanye atau permintaan dukungan kepada negara-negara sahabat agar dapat mendukung Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia juga menyampaikan prioritasnya apabila terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB, seperti menciptakan perdamaian dan stabilitas di tingkat global, meningkatkan sinergi yang baik antar organisasi di tingkat kawasan dan di tingkat global. Indonesia juga akan meningkatkan kerjasama global untuk menindaklanjuti tantangan global seperti terorisme, radikalisme dan ekstremisme yang bisa mengancam perdamaian antar negara dan dunia (Liputan6.com, 2017).

## 2. Multilateral

Untuk mencapai tujuannya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Peserikatan Bangsa Bangsa periode 2019-2020. Indonesia tidak hanya melakukan diplomasi bilateral antar dua negara, akan tetapi juga melakukan kampanye-kampanye di forum-forum internasional yang dihadiri oleh berbagai negara di dunia. Indonesia meminta dukungan negara-negara anggota PBB pada tanggal 22 September 2016. Indonesia melakukan kampanye pencalonannya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 didepan 200 lebih tamu undangan yang merupakan para diplomat asing dan para menteri dari negara-negara di dunia. Kampanye tersebut dilakukan pada saat digelarnya resepsi diplomatik dalam rangka peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-71 disela-sela Sidang Majelis Umum PBB (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016).

Kegiatan kampanye Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dilakukan di Markas Besar, New York, Amerika Serikat. Pada kampanye tersebut Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang pantas untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Indonesia tidak hanya sebagai negara berpendudukan keempat terbesar di duna, akan tetapi juga sebagai negara peringkat ketiga demokrasi di dunia. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki kependudukan muslim terbesar di dunia. Oleh sebab itu, Indonesia merupakan sebuah negara dimana Islam, demokrasi, modernitas dan penguatan perempuan dapat terjalin dalam satu harmoni dan kerukunan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016).

Pada tanggal 24-25 November 2016, Indonesia juga melakukan pertemuan tingkat menteri MIKTA yang terdiri dari negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia. MIKTA merupakan perkumpulan lima negara yang perekonomiannya sedang berkembang, yakni negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia dan dibentuk pada tanggal 17 September 2013 di sela-sela pertemuan ke 68 Majelis Umum PBB (Berlianto, 2017).

Dalam pertemuan MIKTA yang dilaksanakan di Sydney, Australia, Indonesia juga meminta dukungan dari negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Selain Indonesia meminta dukungan untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB, terdapat juga beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan MIKTA tersebut, seperti isu radikalisme, terorisme, kemanusiaan, perubahan iklim dan juga pembangunan ekonomi (Arisandy, 2016).

Pada pertemuan *Indian Ocean Rim Association* (IORA) di Nusa Dua Bali pada tanggal 27 Oktober 2016, Retno L.P Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia juga terus meminta dukungan kepada negara-negara sahabat yang tergabung di *Indian Ocean Rim Association* (IORA) untuk mendukung Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020. Menanggapi permintaan Indonesia kepada negara-negara IORA untuk mendukung pencalonannya sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020, dua Negara anggota IORA yaitu, Australia dan Sri Lanka menyatakan dukungannya terhadap Indonesia setelah selesai pertemuan IORA di Bali (Mardiastuti, 2016).

Dengan seiring meningkatnya hubungan antara Australia dan Indonesia, Australia juga turut memberikan dukungannya bagi Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini disampaikan oleh Julie Bishop setelah pertemuan Indian Ocean Rim Association (IORA) di Bali International Convention Center, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober, 2016. Julie Bishop sebagai Menteri Luar Negeri Australia menyampaikan bahwa Indonesia memenuhi kriteria menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB karena memiliki stabilitas ekonomi yang baik. Indonesia juga turut andil dalam setiap forum untuk mencapai kesehatan baik dalam negeri, kawasan dan juga dunia (Mardiastuti, 2016).

Seusai pertemuan IORA di Bali, Menlu Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa Sri Lanka merespon positif mengenai pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020. Menlu Indonesia Retno Marsudi juga menyapaikan bahwa Menlu Sri Lanka Mangala Samaraweera memberikan dukungannya bagi keikutsertaan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini disampaikan Menlu Sri Lanka pada saat menghadiri pertemuan IORA di Bali (Mardiastuti, 2016).

Diplomasi Multilateral yang telah dilakukan Indonesia di forum-forum Internasional tersebut tentunya memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperoleh dukungan dari berbagai negara untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia senantiasa memaparkan prioritas dan tujuannya menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Tujuan Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia dan stabilitas di tingkat global serta meningkatkan kerjasama global untuk melawan terorisme, radikalisme dan gerakan ekstrimisme lainnya

mendapat dukungan dari berbagai negara agar keamanan dan perdamaian dapat dijaga.

## **C. Cara Diplomasi**

Berdasarkan pengertian diplomasi, diplomasi dilakukan melalui persuasi, menawarkan penghargaan, atau mengirimkan ancaman (Djelantik, 2012). Dalam melakukan diplomasinya, Indonesia menggunakan cara persuasi dan menawarkan imbalan.

### **1. Persuasi**

Indonesia membuktikan peran aktifnya dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Selama bertahun-tahun, menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap pencapaian prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia telah berpartisipasi secara aktif dan berkontribusi semaksimal mungkin dalam program dan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang sosial, ekonomi dan kemanusiaan, dan dalam upaya untuk mempromosikan dan memperkuat perdamaian dan keamanan internasional.

Untuk meyakinkan negara-negara, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno menyampaikan bahwa Indonesia akan bertanggung jawab dan konstruktif, dan berusaha maksimal untuk memberikan sumbangsih (Erdianto, 2016). Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan jumlah pasukan pemelihara perdamaian pada misi perdamaian PBB menjadi 4.000 hingga tahun 2019. Visi

4.000 pasukan pemelihara perdamaian ini merupakan upaya Indonesia dalam menguatkan peran dalam pemeliharaan perdamaian (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016). Selama keanggotaannya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya di tahun 2007-2008. Indonesia memainkan peran sebagai suara moderat dan sebagai jembatan dan pembangun konsensus di antara anggota Dewan Keamanan dan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai isu-isu di bawah lingkup Dewan Keamanan (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017).

## **2. Penawaran Imbalan**

Sedangkan untuk mencapai tujuannya agar terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Indonesia memberikan imbalan berupa dukungan timbal balik kepada negara-negara yang mendukungnya. Dukungan timbal balik, dapat berupa dukungan kepada Negara lain dalam pemilihan anggota tidak tetap DK PBB juga, ataupun dalam keanggotaan dalam forum internasional lainnya. Indonesia telah mendukung Chili untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2014-2015 dan dukungan Indonesia kepada Chili tersebut bukan dukungan cuma-cuma, akan tetapi Indonesia mengharapkan dukungan yang sama dari Chili untuk pencalonan Indonesia pada periode 2019-2020 (Salim, 2017). Tidak hanya Chili, tetapi Luxemburg juga, yang mana Indonesia didukung Luxemburg menjadi anggota tidak tetap DK periode 2019-2020 dan Indonesia membalas dengan mendukung Luxemburg menjadi anggota tidak tetap DK periode 2031-2032 (Adelia, 2017).